

BAB II

SETTING SOSIAL KABUPATEN JEPARA

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Jepara

2.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Jepara terletak di bagian paling ujung utara Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas total sebesar 1.062,01 km², Kabupaten Jepara memiliki enam belas kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Luas Daerah Kabupaten Jepara

KECAMATAN	Km2	Persentase (%)
<i>Subdistrict</i>	<i>Km2</i>	<i>Percentage</i>
1. Kedung	47,87	4,51
2. Pecangaan	38,62	3,64
3. Kalinyamatan	26,08	2,46
4. Welahan	30,43	2,87
5. Mayong	73,64	6,93
6. Nalumsari	57,60	5,42
7. Batealit	100,28	9,44
8. Tahunan	44,46	4,19
9. Jepara	28,16	2,65
10. Mlonggo	49,51	4,66
11. Pakis Aji	67,93	6,40
12. Bangsri	94,63	8,91

13. Kembang	122,68	11,55
14. Keling	126,31	11,89
15. Donorojo	105,32	9,92
16. Karimunjawa	48,47	7,56
JUMLAH / Total	1.062,01	100,00

Sumber: Jepara dalam Angka 2022.

Secara astronomis, Kabupaten Jepara terletak di posisi $110^{\circ}9'48,02''$ sampai $110^{\circ}58'37,40''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}43'20,67''$ sampai $6^{\circ}47'25,83''$ Lintang Selatan. Posisi ini membuat Jepara berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah barat dan utara, Kabupaten Kudus dan Pati di wilayah Timur, dan Kabupaten Demak di wilayah Selatan. Sebagai wilayah pesisir yang berdekatan dengan Gunung Muria, Kabupaten Jepara memiliki topografi wilayah yang lengkap dari dataran pantai, dataran rendah, dataran sedang, hingga dataran tinggi. Persebaran wilayah secara topografis di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Ketinggian 0 – 100 mdpl meliputi wilayah Kecamatan Kedung, Pecangaan, Welahan, Kalinyamatan, Tahunan, Jepara, dan Karimunjawa;
- b. Ketinggian 101 – 500 mdpl meliputi wilayah Kecamatan Mayong, Batealit, dan Mlonggo;
- c. Ketinggian 501 – 1000 mdpl meliputi wilayah Kecamatan Nalumsari, Bangsri, Pakisaji, Kembang, dan Donorojo;
- d. Ketinggian lebih dari 1000 mdpl meliputi wilayah Kecamatan Keling.

Ketinggian ini menyebabkan adanya enam bentuk lahan fungsional yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara, yaitu dataran, dataran alluvial, lembah alluvial, pegunungan sekitar pantai, perbukitan, dan rawa pasang surut. Bentuk lahan fungsional yang beragam ini juga akhirnya menghasilkan beberapa jenis tanah, yaitu tanah andosol coklat, regosol, alluvial, asosiasi mediteran, dan latosol. Oleh karena itu, selain digunakan untuk pekarangan dan bangunan sebesar 29.57%, lahan di Kabupaten Jepara juga digunakan untuk tanah sawah sebesar 25.47%, kebun sebesar 17.8%, dan hutan negara sebesar 17.5%. Sisanya, lahan di Kabupaten Jepara digunakan untuk berbagai macam hal lain, seperti tambak, kolam, padang rumput, rawa, perkebunan negara, tanah yang tidak diusahakan, tanah untuk tanaman kayu, dan lain sebagainya (Jepara dalam Angka, 2022).

2.1.2 Aspek Demografis

Terhitung sejak tahun 2021, populasi penduduk di Kabupaten Jepara sebanyak 1.188.510 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir sama, yaitu 597.802 penduduk laki-laki dan 590.708 penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara dalam satu tahun (2020 – 2021) sebesar 0,22%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara selama sepuluh tahun (2010 – 2020) sebesar 0,7%. Jumlah penduduk yang terbilang besar diikuti di Kabupaten Jepara ini diikuti dengan banyaknya penduduk usia produktif yang dimiliki, yaitu sebanyak 940.272 jiwa (Jepara dalam Angka, 2022). Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penduduk usia produktif di Kabupaten Jepara sebagai berikut:

Tabel 1.3. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Jepara (Jiwa)

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2021	2021	2021
Angkatan Kerja	409.667	277.617	687.284
Bekerja	391.702	266.506	658.208
Pengangguran	17.965	11.111	29.076
Bukan Angkatan Kerja	80.594	220.360	300.954
Sekolah	34.448	36.906	71.354
Mengurus Rumah Tangga	7.660	160.726	168.386
Lainnya	38.486	22.728	61.214
Jumlah	490.261	497.977	988.238

Sumber: Jepara dalam Angka 2022

Menurut tabel di atas, jumlah bukan angkatan kerja yang mengerjakan pekerjaan domestik masih sebagian besar ditanggung oleh jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 36.906 dari total 220.360 populasi perempuan bukan angkatan kerja. Adapun menurut jenis pekerjaannya, penduduk Angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Jepara dibagi atas beberapa lapangan pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1.4. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara 2021

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	53.555	18.680	72.235
Pertambangan dan Penggalian	5.785	825	6.610
Industri Pengolahan	182.005	126.495	308.500
Listrik, Gas, dan Air	5.369	2.248	7.617
Bangunan	50.275	414	50.689
Perdagangan	50.016	82.521	132.537
Angkutan	14.767	-	14.767
Keuangan, Asuransi, dan Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa	7.364	6.207	13.571

Sumber: Jepara dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa industri pengolahan menyerap pekerja terbanyak di Kabupaten Jepara secara signifikan sebesar 308.500 jiwa. Baru kemudian diikuti sektor perdagangan sebesar 132.537 dan sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebanyak 72.235 penduduk.

2.1.3 Kondisi Ekonomi

Bersumber pada data Jepara dalam Angka 2022, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Jepara tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp2,135 triliun. Sementara itu, PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) harga berlaku masyarakat di Kabupaten Jepara tahun 2021 tercatat sebesar 26,96 miliar rupiah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2021 meningkat menjadi 4,63 persen. Sayangnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi ini bertolak belakang dengan presentase penduduk miskin masyarakat di Kabupaten Jepara yang meningkat di tahun 2021 sebesar 7,44 persen di mana tahun sebelumnya sebesar 7,17 persen. Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2016-2020, persentase PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 34,86 persen. Baru kemudian diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16,21 persen, lalu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,82 persen, dan konstruksi sebesar 7,13 persen ((Jepara dalam Angka, 2022).

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/154 tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Kabupaten Jepara ditetapkan sebesar Rp2.272.626 per bulan pada tahun 2023. Ini berarti naik sebesar 7,8 persen atau Rp164.223 dari tahun 2022 (Idris, 2023). Pertumbuhan ekonomi, kontribusi buruh dalam industri, investasi pengusaha, serta harga bahan baku menjadi unsur-unsur penentu UMK Jepara tahun 2023. Dengan besaran UMK tersebut, Jepara

menduduki peringkat sepuluh teratas upah minimum tertinggi pada 35 Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah.

Sebagai Kawasan industri, Kabupaten Jepara memiliki perjalanan yang panjang terkait ketenagakerjaan. Berdasarkan keterangan Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Jepara, jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 yang meningkat tidak selaras dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menurun. Banyak hal yang mempengaruhi fenomena ini dapat terjadi, di antaranya adalah karena banyak penduduk usia kerja yang keluar dari pasar kerja untuk mengurus rumah tangga, sekolah, atau kegiatan lainnya. Selain itu, kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, populasi masyarakat yang tidak seimbang dengan peningkatan kesempatan kerja, dan ketersediaan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pencari kerja menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi rendah (Yunitasari, 2021). Untungnya, keadaan berangsur membaik dibuktikan dengan semakin berkurangnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara. Pada tahun 2020, pengangguran terbuka sebanyak 6,70 persen lalu menurun menjadi 4,23 persen di tahun 2021 (Jepara dalam Angka, 2022).

2.1.4 Kondisi Sosial dan Budaya

Mayoritas penduduk Kabupaten Jepara merupakan pemeluk agama Islam, yaitu sebesar 1.184.253 jiwa (Jepara dalam Angka, 2022). Dalam kesehariannya, masyarakat muslim di Kabupaten Jepara melaksanakan ajaran Nahdlatul Ulama, seperti penyelenggaraan *yasinan* (membaca surat yasin bersama), *tahlilan* (membaca tahlil bersama), *kenduri*, *ruwahan* (silaturahmi antar masyarakat), dan *nyadran* (mengunjungi makam leluhur). Selain Islam, masyarakat Kabupaten

Jepara juga terbilang beragam dengan banyaknya penganut agama lain, seperti Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, hingga aliran kepercayaan. Fenomena ini tak lantas membuat munculnya banyak konflik keagamaan di Kabupaten Jepara. Desa Bondo dan Plajan, salah satu desa dengan pemeluk agama Kristen dan Hindu yang signifikan selain Islam, rutin menyelenggarakan doa bersama dengan tiga agama di setiap tahunnya. Masyarakat di desa ini juga sudah terbiasa untuk saling membantu dan bekerja sama pada aktivitas sehari-hari tanpa membeda-bedakan agama.

Sebagai kabupaten yang berlokasi di pesisir pantai utara Jawa, Jepara memiliki banyak objek wisata pantai dengan ombak yang relatif tenang. Pulau Karimunjawa menjadi destinasi wisata pantai unggulan di Kabupaten Jepara. Alamnya yang masih bersih dengan air lautnya yang jernih dan biota laut yang bervariasi menjadikan Karimunjawa menjadi destinasi populer di kalangan masyarakat, bahkan di luar Kabupaten Jepara. Selain itu, dalam hal seni, Kabupaten Jepara juga terkenal dengan seni ukirnya yang sudah diekspor ke seluruh dunia, ini didukung dengan adanya 201 organisasi seni ukir di Kabupaten Jepara. Komoditas furniture kayu juga menjadi komoditas dengan eksportir terbanyak sebesar 314 eksportir, yang kemudian disusul oleh kerajinan kayu dan *handicraft* (Jepara dalam Angka, 2022).

Keadaan geografis Kabupaten Jepara di wilayah pesisir dengan tanahnya yang cukup subur dan banyaknya industri pengolahan, terutama pengolahan kayu, memunculkan adanya empat mata pencaharian populer di kalangan masyarakat Kabupaten Jepara, yaitu sebagai petani, nelayan, dan pengrajin kayu, pengusaha,

dan buruh pabrik. Jenis mata pencaharian ini pun tak ayal membentuk kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Setidaknya terdapat tiga tradisi terkenal yang setiap tahun rutin diadakan oleh pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Jepara, yaitu tradisi Lomban, Kirab, dan Perang Obor. Tradisi Lomban diadakan satu minggu setelah perayaan idul fitri dengan larung kepala kerbau kelautan. Tradisi ini sebagai simbol rasa syukur masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya di wilayah pesisir, atas banyaknya rezeki yang telah dilimpahkan Tuhan selama satu tahun ke belakang. Tradisi kirab Budaya dilaksanakan untuk memperingati Hari Jadi Jepara, yaitu 10 April, bertepatan dengan dinobatkannya Ratu Kalinyamat sebagai pemimpin Jepara pada 10 April 1954. Tradisi kirab ini dimulai dengan sendratari yang menceritakan perjuangan Ratu Kalinyamat dalam melawan penjajah. Kirab kemudian dilanjutkan dengan iring-iringan pasukan Ratu Kalinyamat yang menunggangi kuda diikuti dengan ratusan pasukan lain di belakang. Pasukan berjalan menuju kompleks makam Ratu Kalinyamat di Desa Mantingan. Kirab pun diakhiri dengan prosesi penggantian kain penutup makam yang dilakukan oleh Bupati Jepara. Tidak seperti tradisi Lomban dan Kirab yang penuh dengan rasa syukur, tradisi Perang Obor merupakan tradisi yang berfungsi untuk menolak bala. Tradisi yang diselenggarakan di Desa Tegalsambi pada setiap Senin Pahing di bulan Dzulhijjah ini dilakukan dengan saling memukulkan pelepah kelapa yang dibakar. Tradisi ini muncul atas dasar adanya Legenda Ki Gemblong, di mana hewan ternak yang sakit milik Mbah Babanan yang digembala oleh Ki Gemblok dapat secara tiba-tiba sembuh dan melarikan diri karena adanya Perang Obor tersebut. Sejak itu,

Perang Obor dipercaya dapat menolak bala dan mendatangkan rezeki bagi masyarakat setempat.

2.2 Kepercayaan Gender dan Struktur Patriarki pada Masyarakat di Kabupaten Jepara

Tidak hanya dikenal dengan kerajinan ukir kayu dan keindahan wisata pantai yang dimiliki, Jepara juga dikenal dengan tiga perempuan hebat yang berhasil menoreh sejarah di Kabupaten Jepara dalam tiga periode yang berbeda, yaitu Ratu Shima, Ratu Kalinyamat, dan RA Kartini. Ratu Shima merupakan penguasa Kerajaan Kalingga pada tahun 674 – 695 M yang berlokasi di pantai utara Jawa Tengah – yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Jepara. Ratu Shima terkenal sebagai pemimpin yang jujur, adil, dan tegas. Ratu Kalinyamat menjadi bupati di Kabupaten Jepara pada abad ke-16 M. Kegigihannya melawan pasukan Portugis membuat Ratu Kalinyamat dikenal sebagai sosok yang pemberani. Baru pada abad ke-19, muncul RA Kartini, putri dari Bupati Jepara, yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya di sektor pendidikan. Semangatnya dalam belajar dan dedikasinya untuk mengajar dan mendirikan Sekolah Kartini membuat Kartini dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita. Ketiga sosok perempuan hebat ini tak ayal menjadi simbol kesetaraan gender di mana perempuan juga memiliki kemampuan yang setara dan layak memperoleh akses yang setara dengan laki-laki pada sektor pendidikan, sosial budaya, maupun pekerjaan.

Hasil dari perjuangan RA Kartini dalam membuka akses perempuan untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan mungkin sudah dapat dilihat

di masa sekarang. Namun, berubahnya kebijakan seringkali tidak beriringan dengan berubahnya budaya dan pola pikir yang melekat dalam diri masyarakat setempat. Budaya patriarki membuat perempuan, khususnya di Kabupaten Jepara, masih harus dihadapkan pada berbagai permasalahan ketidakadilan gender sebagai berikut.

2.2.1 Peran Ganda

Fenomena menarik terkait ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Jepara adalah adanya fakta bahwa lebih banyak pekerja perempuan yang diterima di pabrik-pabrik industri pengolahan, seperti kayu dan garmen. Dari delapan perusahaan terbesar di Kabupaten Jepara dengan total 37.200 pekerja, tujuh puluh persen pekerjanya merupakan perempuan (Tanzila, 2023). Keadaan ini membuat banyak perempuan akhirnya mengambil alih peran untuk memenuhi nafkah keluarga dan suami menjadi bapak rumah tangga. Namun, budaya patriarki yang masih kental membuat perempuan menjadi harus menanggung peran ganda sebagai buruh sekaligus sebagai ibu dan istri di rumah. Ini berarti perempuan harus merasakan kelelahan yang berlipat ganda karena masih harus melakukan pekerjaan rumah sepulang bekerja, seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak secara penuh. Tentu hal ini tidak akan menjadi berat jika dibantu oleh pihak suami, hanya saja budaya patriarki kerap kali membuat suami tidak terbiasa dan bahkan enggan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga istri harus melakukan semuanya. Meskipun menjadi pencari nafkah utama, patriarki membuat perempuan masih saja direndahkan di rumah dan harus sepenuhnya menanggung pekerjaan-pekerjaan domestik.

2.2.2 Perceraian

Lebih banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi perempuan juga berbanding lurus dengan meningkatnya fenomena perceraian di Kabupaten Jepara. Penyebabnya pun bervariasi, namun yang paling kerap ditemukan adalah faktor pertengkaran dan perselingkuhan. Pendapatan istri yang lebih tinggi dari suami, dengan budaya patriarki yang masih kental, masih kerap tak dapat diterima sehingga menimbulkan pertengkaran. Selain itu, jarak yang harus ditempuh buruh perempuan dari rumah ke pabrik yang terlampau jauh memaksa buruh untuk kos demi menghemat waktu di perjalanan. Ini membuat pihak suami memilih mencari perempuan lain dan berselingkuh guna menemani pihak suami. Ketika perceraian terjadi, anak-anak cenderung memilih untuk ikut bersama ibu, sehingga menyebabkan adanya beban ganda yang harus ditanggung oleh ibu, yaitu pencari nafkah dan mengurus anak sebagai orang tua tunggal (Tanzila, 2023).

2.2.3 Nikah Kontrak

Banyaknya pabrik yang bermunculan di Kabupaten Jepara juga memunculkan banyaknya fenomena nikah kontrak. Fenomena kerap dilakukan oleh para pengusaha asing yang ingin mendirikan perusahaan di Kabupaten Jepara. Dikarenakan WNA tidak diperbolehkan mendirikan perusahaannya sendiri, maka pengusaha tersebut menikahi perempuan lokal secara kontrak untuk melegitimasi penanaman modal di Indonesia (Nawati, 2018). Nikah kontrak ini tentu banyak menimbulkan efek negatif bagi perempuan. Relasi kuasa yang timpang antara pihak suami sebagai pengusaha dan pekerja perempuan sebagai pihak istri membuat pihak suami dapat berlaku semena-mena terhadap pihak istri. Selain itu, kawin kontrak

yang seringkali hanya dilakukan secara agama tanpa dilakukan pencatatan di catatan sipil. Ini tentu merugikan pihak perempuan dan anak karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat membuat status kewarganegaraan anak tidak jelas dan tidak diketahui memiliki hak waris atau tidak (Widyastuti, 2017).

2.2.4 Budaya Jawa yang Menempatkan Perempuan sebagai *The Second Sex*

Kendati berkembang pesatnya industri pengolahan membuat adanya kenaikan pekerja perempuan yang signifikan di Kabupaten Jepara, tetapi hal ini tidak bisa mengaburkan fakta bahwa jumlah laki-laki yang bekerja masih lebih banyak dibanding jumlah perempuan yang bekerja (tabel 2). Ini tentu masih berhubungan erat dengan tiga istilah yang dilekatkan pada perempuan, khususnya pada masyarakat Jawa. Ketiga istilah adalah *kanca wingking*, *swarga nunut neraka katut*, dan *macak, manak, masak* (Fitrianto, 2022). *Kanca wingking* mengandung arti bahwa perempuan dipandang sebagai pelengkap di mana posisinya berada di belakang laki-laki. *Swarga nunut neraka katut* menyimbolkan inferioritas perempuan yang seolah tidak memiliki kuasa apapun atas dirinya dan hanya bisa mengikuti keputusan suami. Ini berarti pihak suami yang menentukan secara penuh kebahagiaan (surga) dan kesengsaraan (neraka) dari pihak istri. Sementara itu, **masak, macak, manak** kerap diartikan sebagai ‘kodrat’ seorang perempuan yang bertugas untuk melayani suami dalam hal memasak, berdandan, dan melahirkan anak. Ketiga istilah ini pada akhirnya memosisikan perempuan sebagai makhluk inferior yang seolah tidak memiliki independensi pada diri mereka. Ini pun menimbulkan efek domino lain, yang mana juga terjadi pada masyarakat di

Kabupaten Jepara dengan tradisi Jawa yang masih sangat kental, di mana secara signifikan lebih banyak perempuan yang bertugas untuk mengurus rumah tangga.